

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TAHUNAN 2017



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Tahunan.

Laporan ini memuat realisasi capaian kinerja baik fisik maupun keuangan dan perubahan sarana pendukungnya yang perlu untuk disampaikan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2017. Laporan ini sekaligus sebagai bahan evaluasi dan umpan balik bagi perbaikan kinerja pada bulan berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap karyawan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah berperan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan laporan ini.

Semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Sleman, 2018
Kepala
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Harda Kiswaya, SE., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196401261993031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Maksud dan Tujuan Laporan	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
3. Susunan Organisasi	1
4. Tata Kerja	16
5. Data Lingkungan Tugas Organisasi	17
BAB II PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	24
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS	29

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Laporan.

- 1) Memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Memberikan informasi tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11) dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah.

2) Fungsi

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang keuangan dan aset daerah.
- b. Pelaksanaan tugas bidang keuangan dan aset daerah.
- c. Penyelenggaraan pelayanan bidang keuangan dan aset daerah.
- d. Pembinaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pengkoordinasian keuangan dan aset daerah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sleman berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas.

2) Sekretariat.

a) Tugas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- c) Pelaksanaan urusan umum.
- d) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- e) Pelaksanaan urusan keuangan.
- f) Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
- g) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
- h) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- i) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- c) Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- d) Pengelolaan pelengkapan, keamanan dan kebersihan.
- e) Pengelolaan dokumentasi dan informasi.
- f) Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai.
- g) Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian.
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan.

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan.
- c) Pelaksanaan perbendaharaan pembukuan dan pelaporan keuangan.
- d) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
- c) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- d) Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretarian dan pelaksanaan kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

3) Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

a. Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.
- b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.
- c) Pelaksanaan pendataan pajak daerah.
- d) Pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.
- e) Pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.

- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdiri dari:

1. Subbidang Pendaftaran

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pendaftaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran pajak daerah.
- c) Pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah.
- d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendaftaran

2. Subbidang Pendataan

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan pajak daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pendataan.
- b) Perumusan kebijakan teknis pendataan pajak daerah.
- c) Pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah.
- d) Pelaksanaan administrasi benda berhaga.
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendataan.

3. Subbidang Penetapan

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Penetapan.
- b) Perumusan kebijakan teknis penetapan pajak daerah.
- c) Pelaksanaan analisis pajak daerah.
- d) Pelaksanaan penetapan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah.
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penetapan.

4) Bidang Penagihan dan Pengembangan

a. Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.
- b) Perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.
- c) Pelaksanaan penagihan dan pengendalian penerimaan pajak daerah.
- d) Pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.
- e) Pengembangan pendapatan asli daerah.
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

Bidang Penagihan dan Pengembangan terdiri dari :

1. Subbidang Penagihan

a. Tugas

Menyiapkan beban penagihan penerimaan pajak daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang penagihan.
- b) Perumusan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pembukuan, dan pelaporan, dan pelayanan restitusi pajak daerah.
- c) Pelaksanaan penagihan pajak daerah.
- d) Pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah.
- e) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah.
- f) Pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah.
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penagihan

2. Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.

- b) Rumusan kebijakan teknis pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah.
- c) Pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.
- d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.

3. Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan perkembangan pendapatan asli daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
- b) Perumusan kebijakan teknis pengembangan pendapatan asli daerah.
- c) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah.
- d) Pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah.
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.

5) Bidang Perbendaharaan

a. Tugas

Melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja gaji, belanja non gaji, dan pengendalian kas daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan.
- b) Perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan daerah.
- c) Pelaksanaan penatausahaan belanja gaji, dan belanja non gaji.
- d) Pembinaan penatausahaan belanja gaji.
- e) Pelaksanaan pengendalian kas daerah.
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

1. Subbidang belanja gaji

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pembayaran belanja gaji.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Belanja Gaji.
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja gaji dan pembinaan penatausahaan belanja gaji.
- c) Pelaksanaan pengelolaan belanja gaji.
- d) Pembinaan penatausahaan belanja gaji.
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Belanja Gaji.

2. Subbidang Belanja Non Gaji

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian penatausahaan belanja non gaji dan pengendalian kas daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Belanja Non Gaji.
- b) Perumusan kebijakan teknis penatausahaan belanja non gaji dan pengendalian kas daerah.
- c) Pelaksanaan penatausahaan belanja non gaji.
- d) Pelaksanaan pengendalian kas daerah.
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidan Belanja Non Gaji.

6) Bidang Anggaran

a. Tugas

Melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang anggaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengendalian anggaran daerah.
- c) Pelaksanaan analisis anggaran daerah.
- d) Pelaksanaan perencanaan anggaran daerah.
- e) Pelaksanaan pengendalian anggaran daerah.
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran

Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Subbidang Analisis Anggaran

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian analisis dan pembiayaan anggaran.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Analisis Anggaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis analisis potensi sumber dana dan pembiayaan anggaran.
- c) Analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah.
- d) Pelaksanaan pengelolaan investasi daerah.
- e) Pelaksanaan administrasi hibah dana daerah.
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Analisis Anggaran.

2. Subbidang Perencanaan Anggaran

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian perencanaan anggaran.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Anggaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran.
- c) Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d) Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah.
- e) Penyusunan dokumen penyediaan dana anggaran kas.
- f) Penyusunan informasi penganggaran daerah.
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Anggaran.

3. Subbidang Pengendalian Anggaran

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian anggaran.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian Anggaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah.
- c) Penyusunan peraturan penganggaran daerah.
- d) Pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah.
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian Anggaran.

7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a) Tugas

Melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- b) Perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.
- c) Pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah.
- d) Pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah.
- e) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

1. Subbidang Akuntansi dan Evaluasi

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan evaluasi realisasi keuangan daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
- c) Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
- d) Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah.
- e) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.

2. Subbidang Akuntansi dan Evaluasi

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
- c) Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
- d) Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah.
- e) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.

8) Bidang Aset

a) Tugas

Melaksanakan dan membina perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang aset.
- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pengamanan aset.
- c) Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset.
- d) Pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset.
- e) Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian aset.
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

Bidang Aset terdiri dari :

1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset.
- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan aset.
- c) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.

- d) Pengadaan barang daerah sesuai dengan kewenangan.
- e) Penyusunan penetapan statuss penggunaan barang milik daerah.
- f) Pengurusan status hukum barang daerah.
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset.

2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.
- b) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.
- c) Pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- d) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah.
- e) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- f) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- g) Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.

3. Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

a. Tugas

Menyiapkan bahan penatausahaan dan pengendalian aset.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
- b) Perumusan kebijakan teknis penilaian, penatausahaan, pengendalian dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah.
- c) Pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.

- d) Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
- e) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah.
- f) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah yang belum memiliki nilai.
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

9) Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

(1) UPT Stadion Maguwoharjo

UPT Stadion Maguwoharjo berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Stadion Maguwoharjo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga milik Pemerintah Kabupaten Sleman.

b. Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;
- b) Penyelenggaraan pelayanan dan pemanfaatan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;
- c) Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;
- d) Penyelenggaraan pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;
- e) Penyelenggaraan dan pengembangan pemanfaatan kawasan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Stadion Maguwoharjo terdiri dari:

1. Kepala UPT

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

a. Tugas

Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b. Fungsi

- a) penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b) perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c) penyelenggaraan urusan umum UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- d) penyelenggaraan urusan kepegawaian UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- e) penyelenggaraan urusan keuangan UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- f) penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- g) pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo; dan
- h) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo sesuai dengan keahlian.

(2) UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal

UPT PDPM berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan dana penguatan modal.

b. Fungsi

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dana penguatan modal;
- b) pengoordinasian analisis, verifikasi, dan penetapan besaran dana penguatan modal;

- c) pelayanan informasi dana penguatan modal;
- d) pelaksanaan penyaluran dana penguatan modal;
- e) pelaksanaan administrasi, pembukuan dan pelaporan penyaluran dana penguatan modal;
- f) pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan dana penguatan modal;
- g) pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan evaluasi UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal terdiri dari:

a. Kepala UPT

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Tugas:

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan evaluasi.

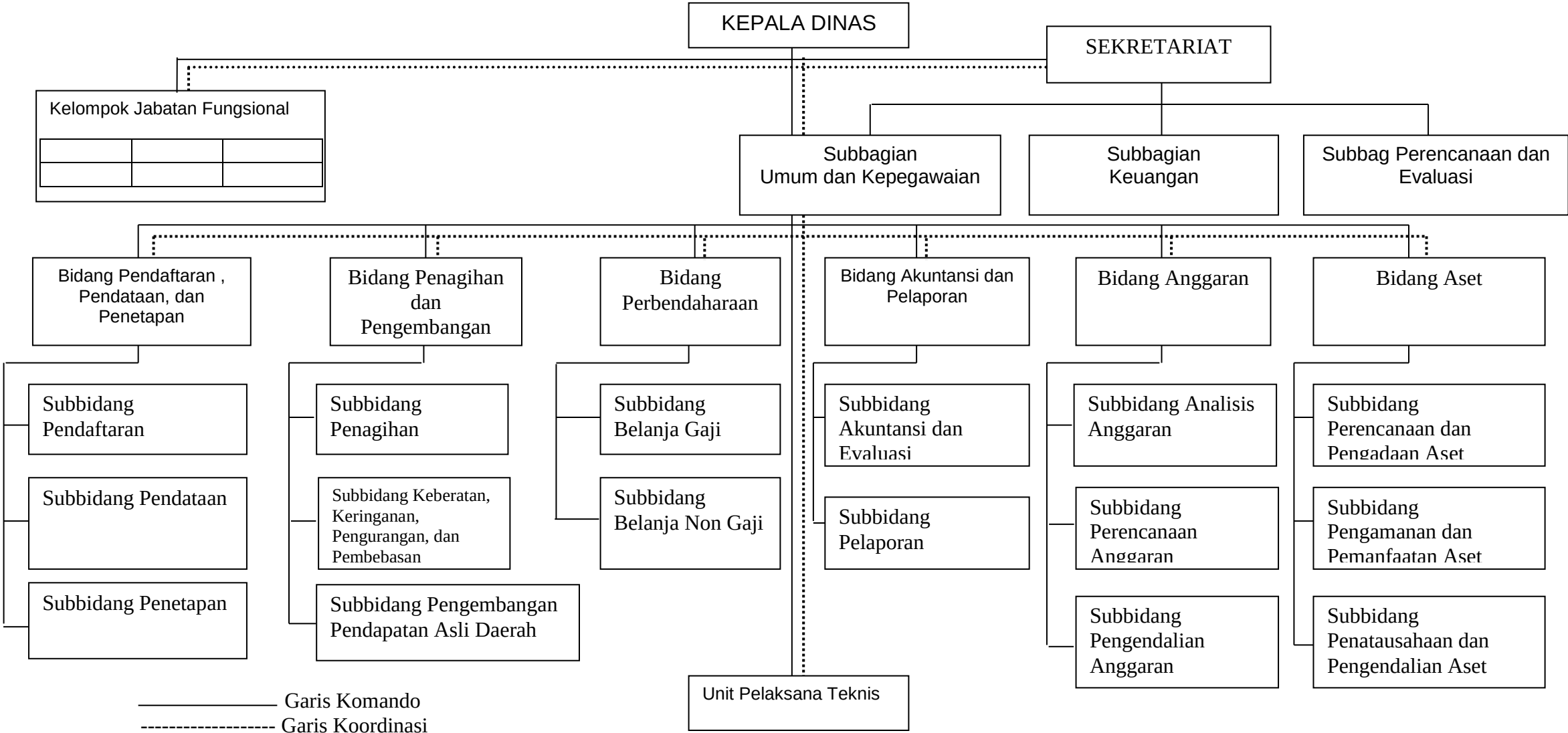
Fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
- c) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal.

c. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal sesuai dengan keahlian.

- 1. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahlian.

BADAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



4. Tata Kerja

- a. Badan Keuangan dan Aset daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- b. Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
- c. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- d. Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.
- e. Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- f. Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.
- g. Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan kepala dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.
- h. Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu dan dapat diberi saran pertimbangan oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- j. Setiap kepala satuan organisasi patuh, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan secara berkala.
- k. Setiap laporan dari bawahan diolah sebagai bahan laporan bagi atasan, petunjuk bagi bawahan serta tembusan bagi organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

5. Data Lingkungan Tugas Organisasi

a. Sumberdaya Manusia / Pegawai

Pelaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah pada didukung oleh sumberdaya manusia / pegawai dengan klasifikasi yang beragam mulai jenis kelamin, pangkat / golongan dan jenjang pendidikan dan diklat yang pernah ditempuh. Sampai dengan akhir Januari 2017 total sumber daya manuasia (PNS) di BKAD tercatat 103 orang. Pegawai berdasar jenis kelamin terdiri atas pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang (45%) dan pegawai berjenis kelamin perempuan sejumlah 55 orang (55%).

Jumlah pegawai menurut golongan terdiri dari Golongan IV berjumlah 16 orang (16%), Golongan III berjumlah 72 orang (72%), dan Golongan II berjumlah 15 orang (15%), seperti tampak dalam tabel berikut :

Tabel : 1
Jumlah Pegawai BKAD
(Menurut Golongan)

No	DINAS/BAGIAN/BIDANG	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Kepala	1				1
2	Fungsional	1				1
3	Sekretariat	3	9	3		15
4	Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	1	9	2		12
5	Bidang Penagihan dan Pengembangan	3	9			12
6	Bidang Perbendaharaan	2	9			11
7	Bidang Anggaran	1	8			9
8	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2	10			12
9	Bidang Aset	1	10	5		16
10	UPT Stadion	1	4	4		9
11	UPT PDPM		4	1		5
	Jumlah	16	72	15	0	103

Tabel : 2
 Jumlah Pegawai BKAD
 (Menurut Tingkat Pendidikan)

Jumlah pegawai yang berpendidikan S-2 berjumlah 24 orang (24%), S-1 berjumlah 39 orang (39%), D-IV berjumlah 3 orang (3%), D-III berjumlah 7 orang (7%), DII berjumlah 1 orang (1%), SLTA berjumlah 27 orang (27%), SLTP berjumlah 1 orang (1%), dan SD berjumlah 1 orang (1%).

NO	DINAS/BAGIAN/BIDANG	PENDIDIKAN								JUMLAH
		S-2	S-1	D-IV	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala	1								1
2	Fungsional		1							1
3	Sekretariat	5	2	2	1		5	1	1	15
4	Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengembangan	3	2		1		6			12
5	Bidang Penagihan dan Pengembangan	3	6				3			12
6	Bidang Perbendaharaan	2	5		1		3			11
7	Bidang Anggaran	4	3	1	1					9
8	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2	7		3					12
9	Bidang Aset	3	6				6		1	16
10	UPT Stadion	1	3			1	3	1		9
11	UPT PDPM		4				1			5
		24	39	3	7	1	27			103

Beberapa pegawai di Badan Keuangan dan Aset juga telah menempuh pendidikan dan latihan baik keahlian maupun pimpinan di berbagai jenjang seperti tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel : 3
 Jumlah Pegawai BKAD
 (Menurut Diklat Struktural / Pimpinan)

No	Pendidikan dan Latihan	Jumlah
1	Spamen/Diklatpim Tk II	1
2	Spama/Spadya/Diklatpim Tk. III	5
3	Sepada/Adum/Sepala/Adumla/Diklatpim Tk. IV	20
	Jumlah	26

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pendukung pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel : 4
Sarana dan Prasarana

Nama Bidang Barang	Keadaan per 2017-12-31		Mutasi/Perubahan				Keadaan per 2017-01-31	
			Berkurang		Bertambah		Jumlah Barang	
	Jml Brg	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga		
Tanah								
Tanah								
Peralatan dan Mesin								
Alat-Alat Besar								
Alat-alat Angkutan	50	1.048.853.613,09	6				44	757.068.095,24
Alat Bantu	1	74.617.165,29	1				0	0
Alat Bengkel dan Alat Ukur								
Alat Pertanian	1	5.151.375,00	-				1	4.006.625,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2294	1.671.066.423,28	504				1790	799.545.952,22
Alat Studio dan Alat Komunikasi	136	129.103.067,60	4				132	90.294.725
Alat-alat Kedokteran								
Alat Laboratorium								
Alat-alat Perenjataan/Keamanan								
Alat Ukur	18	75.641.000,00			-		18	62.880.500,00
Peralatan Komputer	146	4.291.028.665,73			337		483	841.712.211,36
Meja dan Kursi Kerja	77	29.346.233,60			190		267	29.346.233,60
Gedung dan Bangunan								
Bangunan Gedung	23	90.676.640.112,59			7		30	91.398.096.840,46
Monumen								
Jalan, Irigasi dan Jaringan								
Jalan dan Jembatan								
Bangunan Air/Irigasi								
Instalasi	2	6.645.925,00	-		-		2	6.401.562,50
Jaringan	2	95.172.000,00					2	93.269.926,67
Aset Tetap Lainnya								
Buku dan Perpustakaan	2	475.000,00	-		-		2	475.000,00
Barang Bercorak Kebudayaan	19	34.281.000,00						
Hewan dan Ternak serta Tanaman	1	44.078.000,00	-		-		1	44.078.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan								
Konstruksi Dalam Pengerjaan				-				
Jumlah	2775	94.381.447.536,19					2685	94.151.215.888,58
Aset Tak Berwujud								
Software Komputer	10	264.283.152,60			35		45	1.125.685.092,97
Lisensi/Franchise								
Hak Paten/Hak Cipta								
Hasil Kajian								
DED								
Aset Tak Berwujud (Pengerjaan)								
Aset Tak Berwujud Lainnya								
Aset Kemitraan								
Aset Kemitraan								
Jumlah	10	264.283.152,60			35		45	1.125.685.092,97
Jumlah Total	2785	94.645.730.688,79					2785	95.276.900.981,55

c. Anggaran dan Realisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset didukung dana dari APBD Kabupaten Sleman tahun 2017 yang meliputi:

- Belanja Tidak Langsung** :
- Sesudah Perubahan : Rp 32.061.945.800,00
- Belanja Langsung** :
- Sesudah Perubahan : Rp 180.240.928.478,32-

Belanja langsung sebagaimana tersebut diatas dialokasikan untuk melaksanakan 6 urusan yaitu Urusan Keuangan, Uruan wajib komunikasi dan informatika, Urusan wajib kearsipan, Urusan wajib sekretariat daerah, Urusan Inspektorat, Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan. Belanja langusng dijabarkan dalam 12 program yang meliputi 90 kegiatan.

d. Program dan Kegiatan

Selanjutnya laporan perkembangan pelaksanaan program kegiatan yang terdiri dari realisasi keuangan dan fisik pada bulan Desember 2017 kami sajikan pada bab berikut dikelompokkan menurut urusan dan program.

Kode Urusan.SKP D.Prog	Urusan / Program	No.Keg	Kegiatan
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	URUSAN KEUANGAN		
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	01	017	Penyediaan makan dan minum rapat
	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
	01	020	Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
	01	23	Penyediaan jasa langganan
	01	24	Penyediaan jasa keamanan kebersihan kantor
02	Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	02	031	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	05	003	Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya
	05	006	Pengelolaan kepegawaian
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	06	001	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

			SKPD
	06	005	Penyusunan Perencanaan kerja SKPD
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah		
	15	001	Penyusunan Analisis Standar Belanja
	15	002	Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa
	15	005	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan distribusi
	15	006	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD
	15	008	Penyusunan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD
	15	012	Penyusunan Sistem Informasi keuangan daerah
	15	014	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
	15	016	Peningkatan manajemen aset/barang daerah
	15	017	Peningkatan manajemen investasi
	15	026	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan
	15	028	Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD
	15	033	Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)
	15	035	Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan
	15	036	Pengadaan Tanah
	15	037	Pengadaan kendaraan dinas
	15	038	Pengadaan peralatan dan mesin
	15	039	Pengadaan mabelair dan perlengkapan
	15	040	Pemeliharaan Barang Daerah
	15	041	Penyusunan RKBK/RTBU, RKPBU dan RTPBU
	15	042	Penghapusan Aset tetap
	15	045	Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA, dan DPAL
	15	046	Penyusunan Anggaran Kas
	15	051	Penyelesaian status hukum kepemilikan aset daerah
	15	052	Penyempurnaan SIM ASET
	15	056	Analisis data dan penerbitan SP2D
	15	057	Analisis data dan penerbitan SKPP
	15	058	Analisis data gaji, penerbitan SP2D gaji
	15	059	Pengelolaan dan pengendalian dana transfer dan bagi hasil propinsi
	15	061	Pendampingan pengelola keuangan
	15	062	Validasi SPJ
	15	063	Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok
	15	068	Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji
	15	071	Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan Barang daerah
	15	072	Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD
	15	073	Rekonsiliasi data keuangan daerah
	15	075	Pendampingan Program Hibah
	15	076	Penyusunan Laporan Realisasi APBD
	15	077	Penyusunan rencana bisnis dan anggaran
	15	080	Penyelesaian permasalahan Penatausahaan Keuangan
	15	082	Pengelolaan administrasi, penyimpanan dan distribusi Barang Milik Daerah
	15	092	Verifikasi dana penguatan modal

	15	093	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah
	15	095	Monev penguatan modal
	15	097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
	15	098	Pengelolaan Penguatan modal
	15	099	Penatausahaan administrasi dana penguatan modal
	15	100	Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah
	15	106	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
	15	108	Pengendalian Kasda
	15	116	Evaluasi Kebijakan Anggaran
	15	119	Verifikasi dan Klarifikasi Penerangan Jalan Umum (PJU)
18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	18	001	Pendaftaran wajib pajak daerah
	18	007	Penetapan Pajak
	18	010	Penagihan Pajak Daerah
	18	015	Evaluasi PAD
	18	035	Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Sleman (SIMPAMAN)
	18	036	Penyampaian SPT PBB dan Pembayaran PBB Panutan
	18	044	Pelayanan permohonan keringan pajak daerah
	18	045	Penagihan PBB
	18	047	Penelitian SSPD dan BPHTB
	18	049	Pendampingan intensifikasi PPh OPDN
	18	052	Penyelenggaraan Administrasi PBB
	18	057	Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak
	18	058	Pengelolaan, publikasi dan pemasaran stadion
	18	059	Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga
	18	060	Pemeriksaan wajib Pajak Daerah
	18	061	Pendataan, pemantauan dan pembinaan wajib pajak daerah
	18	063	Kajian potensi pendapatan daerah
	URUSAN WAJIB		
	URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		
	15	009	Pengelolaan Website
19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi		
	19	003	Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian
	URUSAN WAJIB KEARSIPAN		
16	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		
	16	002	Pendataan dan Penataan dokumen/arsip daerah
	16	006	Pengelolaan Dokumen SKPD
	16	008	Penyelenggaraan Penyusutan Arsip
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH		
20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
20	20	079	Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD
	20	080	Pelayanan pemanfaatan Aset Daerah
	URUSAN INSPEKTORAT		

15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		
	15	018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
	URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
19	Program perencanaan pembangunan ekonomi		
	19	025	Perencanaan pengembangan investasi

BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode Urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran	Ket
				Bulan Ini	Bulan Lalu	s.d Bulan Ini	%	Fisik (%)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
3.00.05.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		158.718.167.478	27.141.827.809	78.900.487.224	106.042.315.033	66,81	97,46	52.675.852.445	
1.02.10.3.00.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		138.845.250	12.804.125	112.044.500	124.848.625	89,92	100,00	13.996.625	
15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		43.113.000	9.500.000	21.100.000	30.600.000	70,98	100,00	12.513.000	
1.02.10.3.00.05.01.15.009	Pengelolaan Website	Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev	43.113.000	9.500.000	21.100.000	30.600.000	70,98	100,00	12.513.000	
19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		95.732.250	3.304.125	90.944.500	94.248.625	98,45	100,00	1.483.625	
1.02.10.3.00.05.01.19.003	Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian	Raminta, SE. M.Si	95.732.250	3.304.125	90.944.500	94.248.625	98,45	100,00	1.483.625	
1.02.18.3.00.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		368.968.307	98.170.000	225.279.100	323.449.100	87,66	100,00	45.519.207	
16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		368.968.307	98.170.000	225.279.100	323.449.100	87,66	100,00	45.519.207	
1.02.18.3.00.05.01.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Wijayasari, SE, MM	38.280.000	1.934.000	32.073.000	34.007.000	88,84	100,00	4.273.000	
1.02.18.3.00.05.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD	Rr. Yun Wahyuni, SE. MM	281.483.307	59.036.000	186.540.000	245.576.000	87,24	100,00	35.907.307	
1.02.18.3.00.05.01.16.008	Penyelenggaraan penyusutan arsip	Rr. Yun Wahyuni, SE. MM	49.205.000	37.200.000	6.666.100	43.866.100	89,15	100,00	5.338.900	
3.00.01.3.00.05.01	Urusan Sekretariat Daerah		165.782.000	4.596.171	152.224.710	156.820.881	94,59	100,00	8.961.119	
20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik		165.782.000	4.596.171	152.224.710	156.820.881	94,59	100,00	8.961.119	
3.00.01.3.00.05.01.20.079	Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD	Wijayasari, SE, M.Si	84.690.000	4.596.171	76.570.930	81.167.101	95,84	100,00	3.522.899	
3.00.01.3.00.05.01.20.085	Pelayanan pemanfaatan aset daerah	Dewi Pratika Damayanti, SE	81.092.000	0	75.653.780	75.653.780	93,29	100,00	5.438.220	
3.00.03.3.00.05.01	Urusan Inspektorat		43.666.000	12.850.000	23.023.950	35.873.950	82,16	100,00	7.792.050	
15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		43.666.000	12.850.000	23.023.950	35.873.950	82,16	100,00	7.792.050	
3.00.03.3.00.05.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev	43.666.000	12.850.000	23.023.950	35.873.950	82,16	100,00	7.792.050	

3.00.04.3.00.05.01	Urusan Perencanaan		81.750.000	10.628.000	56.951.800	67.579.800	82,67	100,00	14.170.200	
19	Program perencanaan pembangunan ekonomi		81.750.000	10.628.000	56.951.800	67.579.800	82,67	100,00	14.170.200	
3.00.04.3.00.05.01.19.025	Perencanaan Pengembangan Investasi	Siti Nurjannah K, ST,MA,S.Ec.Dev	81.750.000	10.628.000	56.951.800	67.579.800	82,67	100,00	14.170.200	
3.00.05.3.00.05.01	Urusan Keuangan		157.919.155.921	27.002.779.513	78.330.963.164	105.333.742.677	66,70	97,17	52.585.413.244	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		40.161.929.100	3.631.322.882	35.006.580.534	38.637.903.416	96,21	100,00	1.524.025.684	
3.00.05.3.00.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Deni Ria Setiawati, SE, MM	146.300.000	37.100.000	101.175.000	138.275.000	94,51	100,00	8.025.000	
3.00.05.3.00.05.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	125.329.500	14.915.000	105.298.500	120.213.500	95,92	100,00	5.116.000	
3.00.05.3.00.05.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	603.100.000	3.458.500	588.267.706	591.726.206	98,11	100,00	11.373.794	
3.00.05.3.00.05.01.01.020	Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	2.691.348.000	564.769.834	1.757.388.759	2.322.158.593	86,28	100,00	369.189.407	
3.00.05.3.00.05.01.01.023	Penyediaan jasa langganan	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	36.194.199.600	2.959.065.908	32.118.769.344	35.077.835.252	96,92	100,00	1.116.364.348	
3.00.05.3.00.05.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	401.652.000	52.013.640	335.681.225	387.694.865	96,53	100,00	13.957.135	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.351.968.000	131.566.176	893.839.920	1.025.406.096	75,85	93,33	326.561.904	
3.00.05.3.00.05.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	250.000.000	23.043.900	178.426.400	201.470.300	80,59	100,00	48.529.700	
3.00.05.3.00.05.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	801.938.000	102.202.976	544.205.820	646.408.796	80,61	100,00	155.529.204	
3.00.05.3.00.05.01.02.031	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	300.030.000	6.319.300	171.207.700	177.527.000	59,17	80,00	122.503.000	
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		140.895.000	0	82.581.600	82.581.600	58,61	87,50	58.313.400	
3.00.05.3.00.05.01.05.003	Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	92.208.500	0	35.641.600	35.641.600	38,65	75,00	56.566.900	
3.00.05.3.00.05.01.05.006	Pengelolaan kepegawaian	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	48.686.500	0	46.940.000	46.940.000	96,41	100,00	1.746.500	
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		86.133.000	0	79.463.100	79.463.100	92,26	100,00	6.669.900	
3.00.05.3.00.05.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev	44.758.000	0	39.853.400	39.853.400	89,04	100,00	4.904.600	
3.00.05.3.00.05.01.06.005	Penyusunan perencanaan kerja SKPD	Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev	22.658.000	0	21.994.700	21.994.700	97,07	100,00	663.300	
3.00.05.3.00.05.01.06.013	Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD	Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev	18.717.000	0	17.615.000	17.615.000	94,11	100,00	1.102.000	

15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah		100.037.705.321	20.014.342.111	30.163.787.103	50.178.129.214	50,16	96,70	49.859.576.107	
3.00.05.3.00.05.01.15.001	Penyusunan analisa standar belanja	Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT	63.317.000	48.570.000	652.500	49.222.500	77,74	100,00	14.094.500	
3.00.05.3.00.05.01.15.002	Penyusunan standar barang dan jasa	Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT	226.085.000	46.315.000	177.463.500	223.778.500	98,98	100,00	2.306.500	
3.00.05.3.00.05.01.15.005	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	0	0	-1	-1	0,00	0,00	1	
3.00.05.3.00.05.01.15.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	604.076.000	101.075.000	293.589.700	394.664.700	65,33	100,00	209.411.300	
3.00.05.3.00.05.01.15.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	534.722.000	43.913.000	319.200.375	363.113.375	67,91	100,00	171.608.625	
3.00.05.3.00.05.01.15.012	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Sri Suryanti, SE	605.444.000	228.570.000	301.959.000	530.529.000	87,63	100,00	74.915.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.014	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	325.535.000	36.310.000	238.133.000	274.443.000	84,31	100,00	51.092.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.016	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Dewi Pratika Damayanti, SE	16.664.000	0	12.708.000	12.708.000	76,26	100,00	3.956.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.017	Peningkatan manajemen investasi daerah	Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev	66.463.000	3.745.400	53.752.800	57.498.200	86,51	100,00	8.964.800	
3.00.05.3.00.05.01.15.026	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan	Sri Suryanti, SE	39.335.000	8.180.550	25.299.500	33.480.050	85,12	100,00	5.854.950	
3.00.05.3.00.05.01.15.028	Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD	Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT	31.642.500	3.270.000	27.504.500	30.774.500	97,26	100,00	868.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.033	Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)	Raminta, SE, M.Si	108.419.500	3.367.500	91.511.500	94.879.000	87,51	100,00	13.540.500	
3.00.05.3.00.05.01.15.035	Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan	Deni Ria Setiawati, SE, MM	155.149.000	99.067.100	44.862.800	143.929.900	92,77	100,00	11.219.100	
3.00.05.3.00.05.01.15.036	Pengadaan Tanah	Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	69.046.762.713	4.874.895.600	18.794.408.080	23.669.303.680	34,28	50,00	45.377.459.033	
3.00.05.3.00.05.01.15.037	Pengadaan Kendaraan Dinas	Dwi Nugroho, SE, M.Si	11.347.815.480	7.502.711.373	3.248.515.500	10.751.226.873	94,74	100,00	596.588.607	
3.00.05.3.00.05.01.15.038	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Dwi Nugroho, SE, M.Si	6.356.676.255	2.982.474.205	2.567.388.482	5.549.862.687	87,31	100,00	806.813.568	
3.00.05.3.00.05.01.15.039	Pengadaan Mebeleair dan Perlengkapan	Dwi Nugroho, SE, M.Si	5.205.899.173	3.343.682.200	155.376.550	3.499.058.750	67,21	95,00	1.706.840.423	
3.00.05.3.00.05.01.15.040	Pemeliharaan barang daerah	Dewi Pratika Damayanti,SE	941.473.800	61.609.223	734.792.005	796.401.228	84,59	100,00	145.072.572	
3.00.05.3.00.05.01.15.041	Penyusunan RKBURRTBU, RKPBU dan RTPBU	Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev	41.513.875	505.000	37.163.000	37.668.000	90,74	100,00	3.845.875	
3.00.05.3.00.05.01.15.042	Penghapusan aktiva tetap	Dewi Pratika Damayanti, SE	119.792.050	7.927.000	95.138.950	103.065.950	86,04	100,00	16.726.100	
3.00.05.3.00.05.01.15.045	Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	475.745.000	128.825.000	287.515.250	416.340.250	87,51	100,00	59.404.750	
3.00.05.3.00.05.01.15.046	Penyusunan Anggaran Kas	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	17.298.000	9.352.000	5.963.425	15.315.425	88,54	100,00	1.982.575	
3.00.05.3.00.05.01.15.051	Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah	Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev	422.357.500	127.595.400	191.666.387	319.261.787	75,59	100,00	103.095.713	
3.00.05.3.00.05.01.15.052	Pengelolaan SIM Aset	Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si	200.738.000	80.276.500	102.950.900	183.227.400	91,28	100,00	17.510.600	

3.00.05.3.00.05.01.15.056	Analisis data dan penerbitan SP2D	Nisa Fidyati, SE, M.Si	93.127.000	8.526.900	84.414.500	92.941.400	99,80	100,00	185.600	
3.00.05.3.00.05.01.15.057	Analisis Data dan penerbitan SKPP	Raminta, SE, M.Si	31.665.000	3.113.000	28.177.000	31.290.000	98,82	100,00	375.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.058	Analisis data Gaji dan Penerbitan SP2D gaji	Raminta, SE, M.Si	73.538.500	4.873.000	68.075.000	72.948.000	99,20	100,00	590.500	
3.00.05.3.00.05.01.15.059	Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi	Nisa Fidyati, SE, M.Si	90.871.500	19.443.760	67.861.700	87.305.460	96,08	100,00	3.566.040	
3.00.05.3.00.05.01.15.062	Validasi SPJ	Wijayasari, SE.MM	60.074.500	9.069.500	44.824.000	53.893.500	89,71	100,00	6.181.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.063	Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak	Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT	26.561.350	6.110.500	19.490.000	25.600.500	96,38	100,00	960.850	
3.00.05.3.00.05.01.15.068	Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji	Raminta, SE, M.Si	93.405.000	5.130.000	86.240.000	91.370.000	97,82	100,00	2.035.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.071	Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah	Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si	185.389.750	31.670.750	116.490.050	148.160.800	79,92	100,00	37.228.950	
3.00.05.3.00.05.01.15.072	Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD	Wijayasari, SE, MM	306.530.000	9.377.500	205.205.700	214.583.200	70,00	100,00	91.946.800	
3.00.05.3.00.05.01.15.073	REkonsiliasi data keuangan daerah	Wijayasari, Se, MM	30.575.225	4.594.500	24.307.500	28.902.000	94,53	100,00	1.673.225	
3.00.05.3.00.05.01.15.075	Pendampingan program hibah	Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev	90.804.900	7.283.900	77.260.300	84.544.200	93,11	100,00	6.260.700	
3.00.05.3.00.05.01.15.076	Penyusunan laporan realisasi APBD	Sri Suryanti, SE	395.987.000	40.956.000	249.569.250	290.525.250	73,37	100,00	105.461.750	
3.00.05.3.00.05.01.15.077	Penyusunan rencana bisnis dan anggaran	Rumiyati, S.IP	10.627.500	450.000	8.422.500	8.872.500	83,49	100,00	1.755.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.080	Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan	Wijayasari, SE, MM	22.852.500	0	21.946.000	21.946.000	96,03	100,00	906.500	
3.00.05.3.00.05.01.15.082	Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah	Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev	35.886.000	1.995.000	32.909.000	34.904.000	97,26	100,00	982.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.092	Verifikasi dana penguatan modal	Rumiyati, S.IP	60.644.400	14.289.500	43.245.000	57.534.500	94,87	100,00	3.109.900	
3.00.05.3.00.05.01.15.093	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah	Wijayasari, SE, MM	44.274.850	4.846.000	37.867.500	42.713.500	96,47	100,00	1.561.350	
3.00.05.3.00.05.01.15.095	Monev penguatan modal	Rumiyati, S.IP	217.740.000	32.809.000	168.788.500	201.597.500	92,59	100,00	16.142.500	
3.00.05.3.00.05.01.15.097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	Deni Setiawati, SE, MM	82.865.000	20.500	75.170.350	75.190.850	90,74	100,00	7.674.150	
3.00.05.3.00.05.01.15.098	Pengelolaan penguatan modal	Rumiyati, S.IP	202.777.400	13.870.500	177.108.500	190.979.000	94,18	100,00	11.798.400	
3.00.05.3.00.05.01.15.099	Penatausahaan administrasi dana penguatan modal	Rumiyati, S.IP	121.847.000	2.814.000	48.207.000	51.021.000	41,87	90,00	70.826.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.100	Penyusunan regulasi keuangan daerah	Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev	101.311.100	12.581.000	56.235.000	68.816.000	67,93	100,00	32.495.100	
3.00.05.3.00.05.01.15.106	Penyusunan laporan keuangan daerah	Sri Suryanti, SE	493.438.500	28.452.700	429.723.950	458.176.650	92,85	100,00	35.261.850	
3.00.05.3.00.05.01.15.108	Pengendalian KASda	Nisa Fidyati, SE, M.Si	82.454.500	8.822.550	73.453.500	82.276.050	99,78	100,00	178.450	
3.00.05.3.00.05.01.15.116	Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran	Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT	34.094.000	1.005.000	30.192.000	31.197.000	91,50	100,00	2.897.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.119	Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum (PJU)	Deni Ria Setiawati SE.MM	95.439.000	0	81.087.600	81.087.600	84,96	100,00	14.351.400	

[illegible]

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS

Laporan pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman merepresentasikan capaian penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah Kabupaten Sleman. Laporan ini meliputi pelaksanaan kegiatan BKAD baik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD / PPKD).

Pada bulan Mei 2017 program dan kegiatan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman belum dilaksanakan secara optimal. Namun demikian beberapa kegiatan secara fisik tetap dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan tugas BKAD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik, kegiatan di kesekretariatan dan proses administrasi untuk setiap kegiatan. Pada bulan Desember 2017 realisasi keuangan (belanja langsung) adalah Rp. 106.042.315.033 atau sebesar 66,81% dari total anggaran Rp 158.718.167.478 sedangkan realisasi fisik total mencapai 97.46%.

Guna meningkatkan capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, data pencapaian kegiatan dimaksud dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu juga sebagai salah satu acuan dalam rangka perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan maupun perbaikan kinerja BKAD di masa datang.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN : Sleman

NAMA OPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Keuangan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
3. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
4. Urusan Sekretariat Daerah
5. Urusan Inspektorat
6. Urusan Perencanaan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional 1 (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Jumlah Program Nasional	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak -- 12 program	100%	Lihat Program Nasional RKP
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	1. SOP tentang Pembayaran Pajak Daerah Secara Online dan Melalui ATM 2. SOP tentang Penagihan Pajak Daerah 3. SOP tentang Penatausahaan Piutang Pajak 4. SOP tentang Pendaftaran Calon Wajib Pajak 5. SOP tentang Pelayanan e-SPTPD Khusus Jenis Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Penerangan Jalan, dan MBLB	100%	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
						6. SOP tentang Pendataan Wajib Pajak 7. SOP tentang Pemeriksaan Wajib Pajak 8. SOP tentang Pemantauan Wajib Pajak 9. SOP tentang Penelitian SSPD BPHTB 10. SOP tentang Analisa LHP dan Laporan SPTPD 11. SOP tentang Penerbitan SKPD, SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT 12. SOP tentang Penyusunan Target Pendapatan Asli Daerah 13. SOP tentang Bedah Wajib Pajak 14. SOP tentang Pemantauan Wajib Pajak 15. SOP tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan Sanksi Administrasi 16. SOP Pencairan Dana Hibah dan Bansos 17. SOP Penghapusan Aset Daerah 18. SOP Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen 19. SOP tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
						20. SOP Tentang pelayanan Pemanfaatan Aset		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- Perda Nomor 7 Nomor 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah - Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel - Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan - Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame - Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan - Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Minerl Bukan Logam dan Batuan - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan - Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	100%	Normalisasi

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
						- Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak --- 31 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 31	100%	Sumber data BKPP/DUK OPD
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional arsiparis 1	Ada	Sumber data BKPP/OPD. Mengacu kondisi OPD terakhir/updated Tahun 2017
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD , sebanyak 102 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.428 personil	1,03%	Sumber data Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017/ BKPP.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 27 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 31 org.	87,09	Sumber data OPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 31 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 31	100%	Sumber Data OPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA OPD	Ada 3	Sumber data BAPPEDA/OPD yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak 12 program. - Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12	100%	Sumber data OPD Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-OPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 12 program. - Jumlah Program dalam RKA OPD, sebanyak 12 program.	100%	Sumber data OPD. Mengacu dokumen RKA-OPD tahun 2017 dan Renja-OPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	- Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak 12 program. - Jumlah Program dalam DPA OPD, sebanyak 12 program.	100%	Sumber data dari dokumen RKA-OPD tahun 2016 dan dokumen DPA-OPD ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN					- Total Anggaran OPD, sebesar	6,78	

[illegible]

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD, Sebesar Rp 95.631.259.550,54	0%	1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan/kotak saran 3. Leaflet 4. Pengumuman di media masa 5. website	Jumlah 7 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang pelayanan pajak, pelayanan stadion, pelayanan pengelolaan dana penguatan modal	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KABUPATEN : SLEMAN

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA (Tahun 2017)	CAPAIAN KINERJA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			18.	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja X 100% 791.618.080.694,88 : 2.444.676.047.783,30 X 100% = 32,38%	Belanja pelayanan dasar APBD Th 2017 - Ur. Pendidikan 127.242.880.209,00 - Ur. Kesehatan 293.697.061.812,81 - Ur. Lingk.Hidup 27.226.929.276,92 - Ur. PU dan Penataan Ruang 279.399.436.173,16 - Ur. Sosial 4.052.708.034 - Ur. Perumahan Rakyat & Kav 30.174.163.271,27 - Ur. Koperasi 3.412.956.161,00 - Ur. Tramtibum 19.215.933.172,16 - Ur. Kepend.& Capil 7.196.012.584,36	32,38%	BKAD
						Total Belanja pelayanan dasar 791.618.080.694,88 Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp2.444.676.047.783,30		
			19.	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100% 420.939.942.021,81 : 2.444.676.047.783,30 X 100% = 17,22%	Belanja Pendidikan dan kesehatan APBD Tahun 2017 - Urusan Pendedk. 127.242.880.209,00 - Urusan Kes. 293.697.061.812,81 Total Belanja Pendidikan & Kesehatan 420.939.942.021,81	17,22%	BKAD
9.	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU,DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32.	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100% 1.416.428.331.296 : 1.468.851.401.000,00 X 100% = 96,43%	- Dana perimbangan yang terserap th 2017 Rp1.416.428.331.296 - jumlah dana perimbangan sesuai APBD 2017 Rp1.468.851.401.000	96,43%	BKAD
		Alokasi Belanja				- Belanja langsung APBD tahun 2017		BKAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	33.	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100% 1.352.435.693.431,52 : 996.492.454.000,00 X 100% = 135,72%	Rp1.352.435.693.431,52 - DAU tahun 2017 sebesar = Rp996.492.454.000	135,72%	
		Alokasi Belanja pada APBD	34.	Belanja langsung terhadap total APBD	Total belanja langsung dibagi APBD x 100% 1.352.435.693.431,52 : 2.839.219.542.252,57 X 100% = 47,63%	- Total belanja langsung APBD th 2017 1.352.435.693.431,52 - Total belanja APBD tahun 2017 sebesar 2.839.219.542.252,57	47,63%	BKAD
10.	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN/OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100% 825.590.958.579,61 : 2.608.669.963.899,47 X 100% = 31,65%	- PAD APBD (realisasi) tahun 2017 Rp825.590.958.579,61 - Total pendapatan dalam APBD (realisasi) tahun 2017 sebesar Rp Rp2.608.669.963.899,47	31,65%	BKAD
		Besaran SILPA	37.	Rasio SILPA terhadap total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100% 455.734.381.390,71 : 2.608.669.963.899,47 X 100% = 17,47%	- SILPA tahun 2017 sebesar Rp455.734.381.390,71 - Total Pendapatan dlm APBD (realisasi) Tahun 2017 Rp2.608.669.963.899,47	17,47%	BKAD
		Realisasi belanja	38.	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100% 2.444.676.047.783,30 : 2.444.676.047.783,30 X 100% = 100,00%	Realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp2.444.676.047.783,30 Total anggaran belanja dlm APBD th 2017 Rp2.444.676.047.783,30	100,00%	BKAD
12.	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40.	Rasio realisasi PAD 2017 terhadap <u>potensi PAD*</u>	Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi dengan potensi PAD x 100% 825.590.958.579,61 : 841.206.888.925,84 X 100% = 98,1% * Potensi PAD yang tercantum pada RPJMD atau RKPD	Realisasi PAD tahun 2017 sebesar Rp825.590.958.579,61 Potensi PAD pada APBD tahun 2017 Rp841.206.888.925,84	98,14%	BKAD
		Peningkatan PAD	41.	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2017 - PAD 2016): PAD 2016 x100% 108.439.782.551,04 : 717.151.176.028,57 X 100% = 15,12%	- Total PAD pada tahun 2017 sebesar Rp825.590.958.579,61 - Total PAD pada tahun 2016 sebesar Rp717.151.176.028,57	15,12%	BKAD

Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2017

Bulan : Desember 2017

SKPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penanggung Jawab : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si

Kode Urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran	Ket
				Bulan Ini	Bulan Lalu	s.d Bulan Ini	%	Fisik (%)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
3.00.05.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		158.718.167.478	27.141.827.809	78.900.487.224	106.042.315.033	66,81	97,46	52.675.852.445	
1.02.10.3.00.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		138.845.250	12.804.125	112.044.500	124.848.625	89,92	100,00	13.996.625	
15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		43.113.000	9.500.000	21.100.000	30.600.000	70,98	100,00	12.513.000	
1.02.10.3.00.05.01.15.009	Pengelolaan Website	Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev	43.113.000	9.500.000	21.100.000	30.600.000	70,98	100,00	12.513.000	
19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		95.732.250	3.304.125	90.944.500	94.248.625	98,45	100,00	1.483.625	
1.02.10.3.00.05.01.19.003	Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian	Raminta, SE. M.Si	95.732.250	3.304.125	90.944.500	94.248.625	98,45	100,00	1.483.625	
1.02.18.3.00.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		368.968.307	98.170.000	225.279.100	323.449.100	87,66	100,00	45.519.207	
16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		368.968.307	98.170.000	225.279.100	323.449.100	87,66	100,00	45.519.207	
1.02.18.3.00.05.01.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Wijayasari, SE, MM	38.280.000	1.934.000	32.073.000	34.007.000	88,84	100,00	4.273.000	
1.02.18.3.00.05.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD	Rr. Yun Wahyuni, SE. MM	281.483.307	59.036.000	186.540.000	245.576.000	87,24	100,00	35.907.307	
1.02.18.3.00.05.01.16.008	Penyelenggaraan penyusutan arsip	Rr. Yun Wahyuni, SE. MM	49.205.000	37.200.000	6.666.100	43.866.100	89,15	100,00	5.338.900	
3.00.01.3.00.05.01	Urusan Sekretariat Daerah		165.782.000	4.596.171	152.224.710	156.820.881	94,59	100,00	8.961.119	
20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik		165.782.000	4.596.171	152.224.710	156.820.881	94,59	100,00	8.961.119	
3.00.01.3.00.05.01.20.079	Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD	Wijayasari, SE, M.Si	84.690.000	4.596.171	76.570.930	81.167.101	95,84	100,00	3.522.899	
3.00.01.3.00.05.01.20.085	Pelayanan pemanfaatan aset daerah	Dewi Pratika Damayanti, SE	81.092.000	0	75.653.780	75.653.780	93,29	100,00	5.438.220	
3.00.03.3.00.05.01	Urusan Inspektorat		43.666.000	12.850.000	23.023.950	35.873.950	82,16	100,00	7.792.050	
15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		43.666.000	12.850.000	23.023.950	35.873.950	82,16	100,00	7.792.050	
3.00.03.3.00.05.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev	43.666.000	12.850.000	23.023.950	35.873.950	82,16	100,00	7.792.050	
3.00.04.3.00.05.01	Urusan Perencanaan		81.750.000	10.628.000	56.951.800	67.579.800	82,67	100,00	14.170.200	
19	Program perencanaan pembangunan ekonomi		81.750.000	10.628.000	56.951.800	67.579.800	82,67	100,00	14.170.200	
3.00.04.3.00.05.01.19.025	Perencanaan Pengembangan Investasi	Siti Nurjannah K, ST,MA,S.Ec.Dev	81.750.000	10.628.000	56.951.800	67.579.800	82,67	100,00	14.170.200	
3.00.05.3.00.05.01	Urusan Keuangan		157.919.155.921	27.002.779.513	78.330.963.164	105.333.742.677	66,70	97,17	52.585.413.244	

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		40.161.929.100	3.631.322.882	35.006.580.534	38.637.903.416	96,21	100,00	1.524.025.684	
3.00.05.3.00.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Deni Ria Setiawati, SE, MM	146.300.000	37.100.000	101.175.000	138.275.000	94,51	100,00	8.025.000	
3.00.05.3.00.05.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	125.329.500	14.915.000	105.298.500	120.213.500	95,92	100,00	5.116.000	
3.00.05.3.00.05.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	603.100.000	3.458.500	588.267.706	591.726.206	98,11	100,00	11.373.794	
3.00.05.3.00.05.01.01.020	Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	2.691.348.000	564.769.834	1.757.388.759	2.322.158.593	86,28	100,00	369.189.407	
3.00.05.3.00.05.01.01.023	Penyediaan jasa langganan	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	36.194.199.600	2.959.065.908	32.118.769.344	35.077.835.252	96,92	100,00	1.116.364.348	
3.00.05.3.00.05.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	401.652.000	52.013.640	335.681.225	387.694.865	96,53	100,00	13.957.135	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.351.968.000	131.566.176	893.839.920	1.025.406.096	75,85	93,33	326.561.904	
3.00.05.3.00.05.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	250.000.000	23.043.900	178.426.400	201.470.300	80,59	100,00	48.529.700	
3.00.05.3.00.05.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	801.938.000	102.202.976	544.205.820	646.408.796	80,61	100,00	155.529.204	
3.00.05.3.00.05.01.02.031	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	300.030.000	6.319.300	171.207.700	177.527.000	59,17	80,00	122.503.000	
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		140.895.000	0	82.581.600	82.581.600	58,61	87,50	58.313.400	
3.00.05.3.00.05.01.05.003	Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	92.208.500	0	35.641.600	35.641.600	38,65	75,00	56.566.900	
3.00.05.3.00.05.01.05.006	Pengelolaan kepegawaian	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	48.686.500	0	46.940.000	46.940.000	96,41	100,00	1.746.500	
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		86.133.000	0	79.463.100	79.463.100	92,26	100,00	6.669.900	
3.00.05.3.00.05.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev	44.758.000	0	39.853.400	39.853.400	89,04	100,00	4.904.600	
3.00.05.3.00.05.01.06.005	Penyusunan perencanaan kerja SKPD	Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev	22.658.000	0	21.994.700	21.994.700	97,07	100,00	663.300	
3.00.05.3.00.05.01.06.013	Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD	Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev	18.717.000	0	17.615.000	17.615.000	94,11	100,00	1.102.000	
15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah		100.037.705.321	20.014.342.111	30.163.787.103	50.178.129.214	50,16	96,70	49.859.576.107	
3.00.05.3.00.05.01.15.001	Penyusunan analisa standar belanja	Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT	63.317.000	48.570.000	652.500	49.222.500	77,74	100,00	14.094.500	
3.00.05.3.00.05.01.15.002	Penyusunan standar barang dan jasa	Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT	226.085.000	46.315.000	177.463.500	223.778.500	98,98	100,00	2.306.500	
3.00.05.3.00.05.01.15.005	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	0	0	-1	-1	0,00	0,00	1	
3.00.05.3.00.05.01.15.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	604.076.000	101.075.000	293.589.700	394.664.700	65,33	100,00	209.411.300	
3.00.05.3.00.05.01.15.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	534.722.000	43.913.000	319.200.375	363.113.375	67,91	100,00	171.608.625	
3.00.05.3.00.05.01.15.012	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Sri Suryanti, SE	605.444.000	228.570.000	301.959.000	530.529.000	87,63	100,00	74.915.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.014	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	325.535.000	36.310.000	238.133.000	274.443.000	84,31	100,00	51.092.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.016	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Dewi Pratika Damayanti, SE	16.664.000	0	12.708.000	12.708.000	76,26	100,00	3.956.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.017	Peningkatan manajemen investasi daerah	Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev	66.463.000	3.745.400	53.752.800	57.498.200	86,51	100,00	8.964.800	
3.00.05.3.00.05.01.15.026	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan	Sri Suryanti, SE	39.335.000	8.180.550	25.299.500	33.480.050	85,12	100,00	5.854.950	
3.00.05.3.00.05.01.15.028	Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD	Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT	31.642.500	3.270.000	27.504.500	30.774.500	97,26	100,00	868.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.033	Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)	Raminta, SE, M.Si	108.419.500	3.367.500	91.511.500	94.879.000	87,51	100,00	13.540.500	
3.00.05.3.00.05.01.15.035	Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan	Deni Ria Setiawati, SE, MM	155.149.000	99.067.100	44.862.800	143.929.900	92,77	100,00	11.219.100	
3.00.05.3.00.05.01.15.036	Pengadaan Tanah	Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	69.046.762.713	4.874.895.600	18.794.408.080	23.669.303.680	34,28	50,00	45.377.459.033	
3.00.05.3.00.05.01.15.037	Pengadaan Kendaraan Dinas	Dwi Nugroho, SE, M.Si	11.347.815.480	7.502.711.373	3.248.515.500	10.751.226.873	94,74	100,00	596.588.607	
3.00.05.3.00.05.01.15.038	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Dwi Nugroho, SE, M.Si	6.356.676.255	2.982.474.205	2.567.388.482	5.549.862.687	87,31	100,00	806.813.568	
3.00.05.3.00.05.01.15.039	Pengadaan Mebeleur dan Perlengkapan	Dwi Nugroho, SE, M.Si	5.205.899.173	3.343.682.200	155.376.550	3.499.058.750	67,21	95,00	1.706.840.423	
3.00.05.3.00.05.01.15.040	Pemeliharaan barang daerah	Dewi Pratika Damayanti,SE	941.473.800	61.609.223	734.792.005	796.401.228	84,59	100,00	145.072.572	

3.00.05.3.00.05.01.15.041	Penyusunan RKBUR/TBU, RKPBU dan RTPBU	Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev	41.513.875	505.000	37.163.000	37.668.000	90,74	100,00	3.845.875	
3.00.05.3.00.05.01.15.042	Penghapusan aktiva tetap	Dewi Pratika Damayanti, SE	119.792.050	7.927.000	95.138.950	103.065.950	86,04	100,00	16.726.100	
3.00.05.3.00.05.01.15.045	Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	475.745.000	128.825.000	287.515.250	416.340.250	87,51	100,00	59.404.750	
3.00.05.3.00.05.01.15.046	Penyusunan Anggaran Kas	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	17.298.000	9.352.000	5.963.425	15.315.425	88,54	100,00	1.982.575	
3.00.05.3.00.05.01.15.051	Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah	Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev	422.357.500	127.595.400	191.666.387	319.261.787	75,59	100,00	103.095.713	
3.00.05.3.00.05.01.15.052	Pengelolaan SIM Aset	Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si	200.738.000	80.276.500	102.950.900	183.227.400	91,28	100,00	17.510.600	
3.00.05.3.00.05.01.15.056	Analisis data dan penerbitan SP2D	Nisa Fidyati, SE, M.Si	93.127.000	8.526.900	84.414.500	92.941.400	99,80	100,00	185.600	
3.00.05.3.00.05.01.15.057	Analisis Data dan penerbitan SKPP	Raminta, SE, M.Si	31.665.000	3.113.000	28.177.000	31.290.000	98,82	100,00	375.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.058	Analisis data Gaji dan Penerbitan SP2D gaji	Raminta, SE, M.Si	73.538.500	4.873.000	68.075.000	72.948.000	99,20	100,00	590.500	
3.00.05.3.00.05.01.15.059	Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi	Nisa Fidyati, SE, M.Si	90.871.500	19.443.760	67.861.700	87.305.460	96,08	100,00	3.566.040	
3.00.05.3.00.05.01.15.062	Validasi SPJ	Wijayasari, SE.MM	60.074.500	9.069.500	44.824.000	53.893.500	89,71	100,00	6.181.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.063	Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok	Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT	26.561.350	6.110.500	19.490.000	25.600.500	96,38	100,00	960.850	
3.00.05.3.00.05.01.15.068	Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji	Raminta, SE, M.Si	93.405.000	5.130.000	86.240.000	91.370.000	97,82	100,00	2.035.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.071	Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah	Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si	185.389.750	31.670.750	116.490.050	148.160.800	79,92	100,00	37.228.950	
3.00.05.3.00.05.01.15.072	Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD	Wijayasari, SE, MM	306.530.000	9.377.500	205.205.700	214.583.200	70,00	100,00	91.946.800	
3.00.05.3.00.05.01.15.073	REkonsiliasi data keuangan daerah	Wijayasari, Se, MM	30.575.225	4.594.500	24.307.500	28.902.000	94,53	100,00	1.673.225	
3.00.05.3.00.05.01.15.075	Pendampingan program hibah	Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev	90.804.900	7.283.900	77.260.300	84.544.200	93,11	100,00	6.260.700	
3.00.05.3.00.05.01.15.076	Penyusunan laporan realisasi APBD	Sri Suryanti, SE	395.987.000	40.956.000	249.569.250	290.525.250	73,37	100,00	105.461.750	
3.00.05.3.00.05.01.15.077	Penyusunan rencana bisnis dan anggaran	Rumiyati, S.IP	10.627.500	450.000	8.422.500	8.872.500	83,49	100,00	1.755.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.080	Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan	Wijayasari, SE, MM	22.852.500	0	21.946.000	21.946.000	96,03	100,00	906.500	
3.00.05.3.00.05.01.15.082	Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah	Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev	35.886.000	1.995.000	32.909.000	34.904.000	97,26	100,00	982.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.092	Verifikasi dana penguatan modal	Rumiyati, S.IP	60.644.400	14.289.500	43.245.000	57.534.500	94,87	100,00	3.109.900	
3.00.05.3.00.05.01.15.093	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah	Wijayasari, SE, MM	44.274.850	4.846.000	37.867.500	42.713.500	96,47	100,00	1.561.350	
3.00.05.3.00.05.01.15.095	Monev penguatan modal	Rumiyati, S.IP	217.740.000	32.809.000	168.788.500	201.597.500	92,59	100,00	16.142.500	

3.00.05.3.00.05.01.15.097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	Deni Setiawati, SE, MM	82.865.000	20.500	75.170.350	75.190.850	90,74	100,00	7.674.150	
3.00.05.3.00.05.01.15.098	Pengelolaan penguatan modal	Rumiyati, S.IP	202.777.400	13.870.500	177.108.500	190.979.000	94,18	100,00	11.798.400	
3.00.05.3.00.05.01.15.099	Penatausahaan administrasi dana penguatan modal	Rumiyati, S.IP	121.847.000	2.814.000	48.207.000	51.021.000	41,87	90,00	70.826.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.100	Penyusunan regulasi keuangan daerah	Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev	101.311.100	12.581.000	56.235.000	68.816.000	67,93	100,00	32.495.100	
3.00.05.3.00.05.01.15.106	Penyusunan laporan keuangan daerah	Sri Suryanti, SE	493.438.500	28.452.700	429.723.950	458.176.650	92,85	100,00	35.261.850	
3.00.05.3.00.05.01.15.108	Pengendalian KASda	Nisa Fidyati, SE, M.Si	82.454.500	8.822.550	73.453.500	82.276.050	99,78	100,00	178.450	
3.00.05.3.00.05.01.15.116	Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran	Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT	34.094.000	1.005.000	30.192.000	31.197.000	91,50	100,00	2.897.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.119	Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum (PJU)	Deni Ria Setiawati SE.MM	95.439.000	0	81.087.600	81.087.600	84,96	100,00	14.351.400	
18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		16.140.525.500	3.225.548.344	12.104.710.907	15.330.259.251	94,98	98,89	810.266.249	
3.00.05.3.00.05.01.18.001	Pendaftaran wajib pajak daerah	Muhammad Yunan N, S.STP,M.Sc	226.654.000	15.499.000	210.728.500	226.227.500	99,81	106,00	426.500	
3.00.05.3.00.05.01.18.007	Penetapan pajak	Safirta Harya Rekyani,SE. M.Acc	109.503.000	0	108.299.000	108.299.000	98,90	111,53	1.204.000	
3.00.05.3.00.05.01.18.010	Penagihan Pajak daerah	Kusniati, SE, MM	730.222.900	131.940.000	517.426.000	649.366.000	88,93	122,33	80.856.900	
3.00.05.3.00.05.01.18.015	Evaluasi PAD	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	43.761.000	1.400.000	39.497.500	40.897.500	93,46	100,00	2.863.500	
3.00.05.3.00.05.01.18.035	Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN)	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	298.126.000	105.600.000	116.370.000	221.970.000	74,46	100,00	76.156.000	
3.00.05.3.00.05.01.18.036	Penyampaian SPPT PBB dan pembayaran PBB panutan	Safirta Harya Rekyani,SE.M.Acc	1.300.155.000	66.261.000	1.192.604.500	1.258.865.500	96,82	100,00	41.289.500	
3.00.05.3.00.05.01.18.044	Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah	Rodentus Condrosulistyo,SE.MM	156.169.500	26.440.000	114.767.500	141.207.500	90,42	84,40	14.962.000	
3.00.05.3.00.05.01.18.045	Penagihan PBB	Kusniati, SE. MM	6.923.828.000	1.963.169.750	4.715.568.800	6.678.738.550	96,46	80,93	245.089.450	
3.00.05.3.00.05.01.18.047	Penelitian SSPD dan BPHTB	Safirta Harya Rekyani,SE.M.Acc	166.565.000	19.267.500	147.176.500	166.444.000	99,93	96,22	121.000	
3.00.05.3.00.05.01.18.049	Pendampingan intensifikasi PPh OPDN	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	170.521.500	22.740.000	105.485.000	128.225.000	75,20	102,61	42.296.500	
3.00.05.3.00.05.01.18.052	Penyekenggaraan Administrasi PBB	Danang Mintoko, SE	1.206.156.000	0	1.195.917.500	1.195.917.500	99,15	100,00	10.238.500	
3.00.05.3.00.05.01.18.057	Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak	Muhammad Yunan N, S.STP, M.Sc	648.149.400	40.310.000	572.439.000	612.749.000	94,54	92,13	35.400.400	
3.00.05.3.00.05.01.18.058	Pengelolaan, publikasi, dan pemasaran stadion	Suroto, S.Sos	3.342.177.500	715.270.594	2.449.240.557	3.164.511.151	94,68	98,00	177.666.349	
3.00.05.3.00.05.01.18.059	Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga	Suroto, S.Sos	143.068.200	56.123.000	78.019.550	134.142.550	93,76	95,00	8.925.650	

3.00.05.3.00.05.01.18.060	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Danang Mintoko, SE	241.145.000	29.820.000	208.432.000	238.252.000	98,80	100,00	2.893.000	
3.00.05.3.00.05.01.18.061	Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah	Danang Mintoko, SE	338.861.000	31.707.500	263.418.000	295.125.500	87,09	92,00	43.735.500	
3.00.05.3.00.05.01.18.063	Kajian potensi pendapatan daerah	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	95.462.500	0	69.321.000	69.321.000	72,62	100,00	26.141.500	

Sleman, 29 Desember 2017
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman

H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
NIP. 19640126 199303 1 004